



**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, maka sebagai langkah awal diperlukan perencanaan strategis untuk melakukan pengukuran pencapaian kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal dan global.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dalam 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pilihan Perindustrian, Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Wajib Koperasi agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah cepat dan dinamis seperti halnya dengan kondisi saat ini, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Oleh karena itu, Dinas Perindagkop & UKM telah berupaya untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang akan dicapai dan yang menjadi kendala/permasalahan dalam suatu organisasi, dengan kata lain Rancangan Rencana Kerja Dinas perindagkop & UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaiannya dan lebih difokuskan pada peranan yang dapat diberikan dalam rangka mensinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat Tahun 2021.

Akhirnya, Rencana Kerja Dinas Perindagkop & UKM Tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Pln Kepala Dinas,



Rodi Ahnadi, S.E.
Pembina Tk. 1 /IVb
NIP.19621007 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB 2 EVALUASI PELAYANAN RENJA SKPD TAHUN 2019	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019	6
2.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD	26
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	42
2.5. Penelahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	49
BAB 3 TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	55
3.3. Program dan Kegiatan	59
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
IV.1 Program Prioritas	68
IV.2 Program Rutin	68
BAB 5 PENUTUP	70
Lampiran Program Kegiatan sesuai dengan Pemetaan Permendagri No 90	

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah langkah awal penetapan kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggung jawaban. Kesalahan dalam pembuatan rencana kerja dapat berakibat tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah, oleh karena itu rencana kerja harus dibangun berdasarkan kondisi yang ada, dan didukung oleh berbagai instansi dan lembaga – lembaga yang ada dalam lingkup Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur ini bersinergi dan mengacu pada program Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terakhir Perubahan dengan peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;
19. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perindustrian No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Penganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

25. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran 4 Pasal 1 Butir 10);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; kemudian Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur .
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tanggal 17 Juli 2020 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja tahun 2021 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Mensinergikan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM pada level nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c) Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2021 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
- d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.

I.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab 1 : Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program Prioritas

4.2 Program Rutin

Bab 5 : Penutup

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur juga harus dilakukan evaluasi yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan, serta memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s/d Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel (terlampir).

Tabel.

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur
Periode Pelaksanaan Tahun 2019

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		14 = 13/5*100%		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100 %	21,028,803,000	100	9981210404	86 %	4,292,811,500	15	636,505,823	31	700,053,808	15	882,690,401	25	776,928,522	86	2,996,178,554	100	70	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	60 bulan	21,028,803,000	24	9981210404	12 bulan	4,292,811,500	3	636,505,823	3	700,053,808	3	882,690,401	3	776,928,522	12	2,996,178,554	100	70	
	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100 %	33,374,683,000	100	2268229552	5 unit	3,726,148,500	0	151,089,028	0	320,978,139	0	1,021,381,419	5	1,974,915,554	5	3,468,364,140	100	93	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	130 unit	26,805,818,000	30	431304000	130 unit	2,552,650,000		-	99	61,815,000	20	710,487,115	11	1,564,310,000	130	2,336,612,115	100	92	
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	60 bulan	6,568,865,000	24	1836925552	12 bulan	1,173,498,500	3	151,089,028	3	259,163,139	3	310,894,304	3	410,605,554	12	1,131,752,025	100	96	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar Kompetensi	100 %	10,827,615,000	2034273814	50 %	1,576,015,000	0	241,320,920	0	380,475,784	0	268,976,960	75	670,307,550	75	1,561,081,214	150	99		
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	198 Keg	8,428,915,000	24	2034273814	198	1,229,915,000	13	241,320,920	62	175,450,184	55	268,976,960	38	541,028,750	168	1,226,776,814	84.848	100	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 orang	2,398,700,000	0	0	20	346,100,000			5	205,025,600	2		8	129,278,800	15	334,304,400	75	97	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K
			Jumlah Seragam Pegawai	198 orang			198			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	198		100	#DIV/0!	15	
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas	79 %	6,301,245,000	1,082,497,640	75 %	1,066,200,000		69,999,700	74.79	484,616,900		143,522,750		74.79	933,379,830	99.72	176				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	30 Dokumen	3,367,645,000	30	819488200	6	Dokumen	548,600,000	0	39450000	4	384,360,800	1	-	1	-	6	423,810,800	100	77	
		Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	20 Dokumen	2,933,600,000	20	263,009,440	4	Dokumen	517,600,000	0	30,549,700	4	100,256,100	0	143,522,750	0	235,240,480	4	509,569,030	100	98	
	Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi	Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM Naik Kelas	1	1,194,160,000	972,027,300	100	Unit	1,194,160,000		45,050,800		41,070,000	245	269,524,700		766,006,200	245	1,121,651,700	245	94	Program Prioritas	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang terfasilitasi kebijakan pengembangan UKM	UKM 200	1,194,160,000	115	972,027,300	200	UKM	1,194,160,000	0	45,050,800	0	41,070,000	183	269,524,700	40	766,006,200	223	1,121,651,700	111.5	94	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri	1	571,570,000		210,077,450	100	571,570,000	0	56,322,876	46	73,790,000	35		98	302,785,200	179	515,599,076	179	90	Program Prioritas
		Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri yang mendapatkan fasilitasi produksi pemasaran dan pembiayaan	WUB 200	571,570,000	30	210,077,450	200	571,570,000	0	56,322,876	46	73,790,000	171	82,701,000	0	302,785,200	217	515,599,076	108.5	90	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	1	4,441,790,000		6,667,432,551	100	4,441,790,000		180,716,704		1,037,187,300	31	875,780,762		2,232,438,471	31	4,326,123,237	31	290	
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Kopera 1,000si RAT	416,630,000			1,00	416,630,000	259	65,215,804	67	41,771,200	384	61,163,060	0	225,724,800	710	393,874,864	71	95	
		Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan perkoperasian	Unit 100	453,640,000	21	195,878,500	100	453,640,000	0	115,500,900	40	8,975,100		98,078,600	90	223,162,000	130	445,716,600	130	98	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Diklat SKKNI bagi Manajer	orang 99	3,571,520,000	1,600	6,471,554,051	30 orang	3,571,520,000	0		0	986,441,000	30	716,539,102	0	1,783,551,671	30	3,486,531,773	100	98	15
			Diklat peningkatan Kapasitas usaha dan kelembagaan Koperasi					720 orang		0		420				300		720		100		
			Diklat Kewirausahaan bagi kelompok masyarakat Strategis					120 orang		0		0				120		120		100		
			capacity Building bagi pendamping dan Aparat Pendamping					30 orang		0		40				0		40		133.33		
			Rakor evaluasi pelaksanaan DAK					1 laporan		0		0				1		1		100		
			Diklat Peningkatan produk unggulan berbahan baku lokal					30 orang		0		30				30		60		200		
			Diklat Perkoperasian bagi koperasi perkebunan					30 orang		0		0				30		30		100		
			Diklat Perkoperasian					30 orang		0		0				30		30		100		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K	Rp.	
	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan																								
		Program Penataan struktur industri	Volume usaha perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	Milyar	1			100	Milyar	626,000,000	0	94,525,470	0	113,627,925		136,655,683	70.88	228,082,589	70.88	572,891,667	70.88	92			
	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir		Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	Perusahaan	500,000,000	2	302,934,865	3	Perusahaan	500,000,000		94,525,470	2	113,627,925	0	128,559,400		122,805,789	2	459,518,584	66.667	92			
	Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah			%	126,000,000	9,075	406,588,100	100	%	126,000,000			25	-	25	8,096,283	50	105,276,800	100	113,373,083	100	90			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	%	2,529,800,000	1,415,742,600	1,415,742,600	1.0	2,604,800,000	-0.4	186,831,694	0.32	334,477,120	0.35	649,463,837	0.36	1,270,261,099	0.63	2,441,033,750	63	94	Program Prioritas
		Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan industri	unit 100	2,529,800,000	30 1,415,742,600	30 1,415,742,600	30 unit	2,604,800,000	0	186,831,694	1	334,477,120	27	649,463,837	2	1,270,261,099	30	2,441,033,750	100	94	
		PERDAGANGAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG																				
Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen		Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	1	15,926,000,000	894,066,095	894,066,095	29 %	2,150,000,000		258,111,938	38.42	401,323,200	0	461,889,373	0		38.42	1,855,363,111	132.48	166	
			barang beredar yang Wajib SNI					29 %						30.4				30.4		104.83		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	jumlah konsumen yang teredukasi	Konsu 5,000men	4,257,975,000	-		1,000 orang	550,475,000	200	20,780,500	150	105,347,000	600	174,074,673	400	153,694,700	1350	453,896,873	135	82	Kegiatan APBN 300
		Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pelaku 850Usaha	5,166,275,000	36	894,066,095	150 orang	446,775,000	284	177,006,216	29	25,775,000	25	89,535,800	32	83,157,000	370	375,474,016	246.67	84	Pada masing Kab/Kota 15 Pelaku Usaha realisasi dilapangan melebihi target bervariasi
		koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	jumlah pengaduan Konsumen yang dapat diselesaikan	Pengaduan 111 uaan	6,501,750,000	-		18 pengaduan	1,152,750,000	4	60,325,222	5	270,201,200	2	198,278,900	6	497,186,900	17	1,025,992,222	94.444	89	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang Penting	1	971,600,000	4	533,097,960	4	971,600,000	4	68,640,200	4	111,677,500	4	306,041,200	4	460,035,900	4	920,099,800	100	185		
		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	jumlah fasilitasi penyediaan bahan pokok dan penting	Fasilita 40	307,600,000	83	229,072,600	40	Fa silita si	307,600,000	6	42,222,200	20	-	10	-	4	224,879,200	40	267,101,400	100	87	
		Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan	Jumlah informasi stok dan harga barang pokok dan barang strategis yang tersedia setiap hari	64 64	664,000,000	128	304,025,360	64	Je ni s K o m o d i t a s	664,000,000	64	26,418,000	64	85,382,500	64	306,041,200	64	235,156,700	64	652,998,400	100	98	
		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan	nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	1	1,079,400,000		425,644,256	200	ju ta	1,079,400,000	19.0 5	46,183,900	0	137,989,800	112.92	376,879,900	1,679 .59	477,960,900	1,812	1,039,014,500	905.78	96	
		Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan	jumlah pelaku usaha yang melakukan kerjasama pemasaran	UKM 10	1,079,400,000	20	425,644,256	11	P e l a k u U s a h a	1,079,400,000	1	46,183,900	4	137,989,800	7	376,879,900	15	477,960,900	27	1,039,014,500	245.45	96	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K
		Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara	2	737,000,000	3,888,207,265	1.43 Milyar U S \$	737,000,000	0.32	40,428,000	0.405	108,689,100	0.448	241,600,500	1.559	319,500,400	1.559	710,218,000	109.02	283			
		Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah eksportir yang mendapatkan fasilitas penerbitan SKA	Ekspor 10ir	108,000,000	80	43,250,000	10	Ekspor 10ir	108,000,000	3	-	1	43,520,700	4	-	2	50,535,200	10	94,055,900	100	87	
		membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah eskportir yang menggunakan fasilitas ekspor Direct Call	Ekspor 5ir	355,200,000	14	2,592,793,665	65	Ekspor 5ir	355,200,000	0	17,269,000	3	-	2	162,912,900	1	168,965,200	6	349,147,100	120	98	
		Koordinasi Program Pengembagnan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah Laporan Kegiatan Ekspor Impor Kab/Kota se Kalimantan Timur	Lapora 10n	273,800,000	18	1,252,163,600	10	Lapora 10n	273,800,000	3	23,159,000	3	65,168,400	4	78,687,600	2	100,000,000	12	267,015,000	120	98	
		Sub Total Perdagangan																					

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	% 100	7,484,635,000			% 100	1,132,000,000	17.8 1	201,608,136	17.47	197,777,713			61.05 088	96.332	1,090,481,850	96.332	96	15	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	bulan 60	7,484,635,000	-		12 bu la n	1,132,000,000	3	201,608,136	3	197,777,713	3	391,096,001	3	300,000,000	12	1,090,481,850	100	96	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	% 100	2,487,949,000			% 100	359,400,000	0	-	20	73,927,250		141,625,075	80	141,625,074	100	357,177,399	100	99	
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	bulan 60	2,487,949,000	-		12 bu la n	359,400,000	3		3	73927250	3	141,625,075	3	141,625,074	12	357,177,399	100	99	
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah	% 100	2,944,698,000			% 5	308,100,000	0	35,776,000	5	16,357,100		54,732,450		200,454,910	5	307,320,460	100	199	
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	keg 50	1,508,749,000	-		10 K eg	160,000,000	3	35,776,000	2	14,397,100	2	54,732,450	3	54,732,450	10	159,638,000	100	100	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	80	1,435,949,000	-		16	148,100,000	0	-	0	1,960,000	15		1	145,722,460	16	147,682,460	100	100	15
		Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	1	12,404,118,000	1,673,439,411	5	1,958,400,000	4	52,885,000	15	99,500,100		727,797,697		727,797,697	19	1,948,422,494	380	198		
		Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	ruang lingkup akreditasi Laboratorium yang di	Komodi 18ti dan Ruang ling	9,418,259,000	4	880,121,225	9	1,511,400,000	0	23,995,000	0	28,600,000		727,797,697	9	727,797,697	9	1,508,190,394	100	100	
		Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	jumlah Presentase Penerimaan Retribusi	Sertifikat 2,273	2,985,859,000	3,945	793,318,186	100	447,000,000	34.82	28,890,000	29.33	70,900,100	22.5	170,221,000	13.35	170,221,000	100	440,232,100	100	98	
		UPTD Pelatihan Koperasi & UKM																				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	%	8,525,461,000			%	1,209,200,000	0.77	222,415,319	0.855	245,531,762	73.4	309,547,100	25	335,405,388	100.03	1,112,899,569	100.03	92	15
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	bulan	8,525,461,000	-		12 bulan	1,209,200,000	3	222,415,319	3	245,531,762	3	309,547,100	3	335,405,388	12	1,112,899,569	100	92	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	%	4,768,401,000			%	622,650,000	0.81	4,435,230	32.04	176,152,272	45	153,359,231	23	213,418,905	100.85	547,365,638	100.85	171	
		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	unit	688,516,500	-		8 unit	72,800,000		-		-	7	53,800,000	1	6,000,000	8	59,800,000	100	82	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	bulan 60	4,079,884,500	-		12	549,850,000	3	4,435,230	3	176,152,272	3	99,559,231	3	207,418,905	12	487,565,638	100	89	15
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah	% 100	3,508,865,000			100	409,900,000	0.57 71	45,256,200	0.741	58,522,800	70	77,930,800	28.7	198,228,500	100.02	379,938,300	100.02	189	
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Keg 100	2,630,600,500	-		20	334,900,000	2	45,256,200	2	58,522,800	8	77,930,800	8	124,919,900	20	306,629,700	100	92	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Orang 35	878,264,500	-		5	75,000,000		-					5	73,308,600	5	73,308,600	100	98	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2019 s.d 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						K
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih	100 org	7,144,159,000			300	923,136,000	0	134,449,350	100	211,062,300	100	206,197,480	100	341,386,200	300	893,095,330	100	194		
		Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	10Dokmen	3,367,752,700	-		10	444,230,000	6	46,193,350	3	105,769,900	1	90,999,380	1	195,722,600	11	438,685,230	110	99		
		Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	300Orang	3,776,406,300	-		10	478,906,000	2	88,256,000	4	105,292,400	4	115,198,100	0	145,663,600	10	454,410,100	100	95		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			114.11		110.28		
Predikat Kinerja																							

II.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Evaluasi pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian sasaran dengan pencapaian (realisasi) kinerja, maka didapatkan hasil :

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target 2019	Realisasi	Ket
1		2	3	4	5	6	8
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	1. Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	%	20%	17.77%	
		2. Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	USD	14.5 Milyar	14.11 Milyar	
			Disparitas harga antar wilayah	%	20%	13.80%	
		3. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	indeks	30	38.4	
2.	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	4. Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	unit	10	16	
			UKM Unggulan	Unit	25	41	
			Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	%	4.5%	15.07%	
		TOTAL					

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2019 implementasinya mencakup pelaksanaan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dalam 21 (dua puluh satu) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2019, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

□ Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan
Dengan Indikator	:	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2019 ini adalah 20%, dan realisasi tingkat capaian hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sampai triwulan III sebesar 17,77%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 88.85 persen .

□ Sasaran II	:	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas
Dengan Indikator	:	1. Nilai ekspor non migas (Milyar dollar) 2. Disparitas harga antar wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II pada tahun 2019 ini adalah untuk indikator nilai ekspor non migas, ditetapkan targetnya sebesar US\$ 14.5 Milyar dan realisasi ekspor non migas sebesar US\$ 14.11 Milyar sampai bulan Desember, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 97,31%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 20% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 13.12%, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar

65,6%. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota semakin kecil maka semakin baik.

☐ Sasaran III	:	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
Dengan Indikator	:	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III pada tahun 2019 adalah 30 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 38,4, sehingga pencapaian indikator sarasanya sebesar 128 persen.

☐ Sasaran IV	:	Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi
Dengan Indikator	:	1. Koperasi Unggulan 2. UKM Unggulan 3. persentase sumbangan koperasi terhadap PDRB

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV tahun 2019 adalah untuk Koperasi Unggulan sebesar 10 koperasi dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 16 sehingga persentase pencapaian sarasanya sebesar 160 persen.

Sedangkan untuk indikator UKM Unggulan sebesar 25 UKM dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 41, sehingga persentase pencapaian indikator sarasanya sebesar 164 persen.

Indikator ke tiga yaitu Persentase sumbangan koperasi dan UKM terhadap PDRB ditargetkan 4,5%, namun realisasinya 15,07%, sehingga capainya sebesar 334,89%.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a) Isu dan Masalah Mendesak Serta Solusi dan Harapan di Bidang Industri

i. Isu dan Masalah Mendesak

Perkembangan industri di Kalimantan Timur sendiri mengalami pasang surut, yang diakibatkan oleh pola kebijakan ekonomi makro nasional maupun internasional. Salah satu sektor industri andalan diluar migas dan tambang yang selama ini menjadi komoditas utama Kalimantan Timur adalah sektor hutan. Hal ini memang sangat memungkinkan, mengingat 60 persen wilayah Kalimantan Timur adalah hutan. Namun seiring waktu berjalan, luas wilayah hutan daerah ini semakin mengecil yang diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah aktivitas tambang batubara yang semakin tinggi beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Sektor industri lokal berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian dikarenakan sektor industri kita sangat lemah, baik dalam hal teknologi, kapasitas produksi dan kemampuannya untuk bersaing dengan industri asing. Disamping itu, sektor industri lokal Kalimantan Timur juga tidak memiliki platform kerakyatan, yakni sebagai penopang utama bagi kesejahteraan rakyat, melainkan berplatform kapitalisme atau ambil untung saja tanpa pertimbangan pembangunan segala bidang yang berkelanjutan (*sustainable development*). Kekayaan alam Kalimantan Timur, terutama di sektor tambang minyak, batubara dan gas, tidak mampu menopang secara optimal pertumbuhan industri lokal.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian,

diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, maka diketahui terdapat enam permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur, yaitu :

- 1) Ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui) dalam mengembangkan sektor industri Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pembangunan industri.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
- 4) Pertumbuhan dan jumlah tenaga kerja lokal sektor industri yang relatif masih rendah.
- 5) Pertumbuhan ekspor sumberdaya alam *renewable* yang masih rendah.
- 6) Perkembangan kawasan industri yang belum optimal.

ii. Upaya Yang Dilakukan (Solusi)

Maka dalam rangka pengembangan industri di Kalimantan Timur, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (PIKM) di Kalimantan Timur, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBN (Dekonsentrasi) dan APBD (Desentralisasi), diantaranya adalah :

- Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama di Kab/Kota.
- Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah perlu terus dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instruktur/Pembina di lapangan.
- Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruhan wilayah Kalimantan Timur terutama untuk daerah pedalaman dan perbatasan, maka diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kab/Kota untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat menghubungkan antara daerah kota dengan Kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efisien dengan harga yang bersaing ke daerah perkotaan.
- Guna pengembangan usaha, industri kecil menengah memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) terus memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.
- Agar dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan sektor komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif.
- Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk industri kecil memang untuk lebih ditingkatkan baik melalui peran serta media, pameran dan pembuatan leaflet/brosur.

Dalam hal ini upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri telah dilakukan, khususnya pemberdayaan dan pembinaan industri di Provinsi Kalimantan Timur, dimana berdasarkan kondisi nyata di lapangan dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu melakukan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya diharapkan dapat berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/perajin pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya.

iii. Harapan yang diinginkan dengan Pusat (Kementerian Perindustrian)

- Perlunya dukungan dengan Kementerian Perindustrian dalam peningkatan utilisasi produksi: Penguasaan pasar domestik, ekspor, dan informasi pasar; Peningkatan efisiensi bahan baku dan energi.
- Perlunya juga penguatan struktur pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain): Peningkatan nilai tambah dengan peningkatan TKDN; Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemberian insentif dibidang fiskal, moneter dan administrasi termasuk jaminan hukum dan kestabilan keamanan; dan Pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Perlunya kerjasama dalam dengan pusat dalam pengembangan teknologi kedepan : Peningkatan kemampuan alih teknologi.

- Pengembangan berdasarkan inovasi teknologi dalam negeri; Aplikasi lisensi teknologi proses yang dikembangkan secara bersama sama dengan pemilik lisensor; Sinergi dalam penelitian teknologi proses industri petrokimia; dan Pengembangan kemampuan SDM.
- Perlunya dukungan pusat dalam pengembangan lokasi klaster: Perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur; Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat; dan Fasilitasi kolaborasi antar stakeholder.
- Perlunya bantuan dalam mendukung peningkatkan kualitas & kuantitas prasarana yang memadai untuk kelancaran produksi & pemasaran.
- Dukungan pusat untuk mempromosikan daerah dalam mendorong investasi baru untuk kawasan industri yang kompetitif;
- Dan memberikan harmonisasi tarif produk petrokimia hulu, antara & hilir.
- Membantu mempercepat koordinasi pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung pengembangan industri di Kaltim.
- (KEK)/Kawasan Industri.
- Mendukung upaya perluasan pengembangan kualitas SDM pelaku IKM dan aparaturnya.

b) Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di Bidang Perdagangan.

i. Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan Perdagangan Dalam Negeri

Isu dan Masalah Mendesak :

- Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama di pedalaman/perbatasan kurang lancar.
- Kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.
- Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pasar dan gudang barang kebutuhan pokok yang layak.
- Penataan PKL masih belum tersentuh secara optimal.
- Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
- Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota.
- Lambatnya penerimaan Laporan SIUP dan TDP dari Kabupaten/Kota.
- Belum optimalnya perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota.
- Masih ditemukan barang-barang yang beredar yang tidak layak jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan kadaluarsa.
- Tidak semua Kabupaten/Kota siap/memiliki SDM, sarana dan prasarana Kemetrolagian sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
- Masih adanya disparitas harga menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.

ii) Upaya yang Dilakukan (Solusi)

- Melakukan prognosa kebutuhan bahan pokok dan barang penting.
- Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
- Melakukan pemantauan harga.
- Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
- Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.

- Melakukan misi dagang dan pameran.
- Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi dan pengawasan barang beredar/jasa.

iii)Harapan yang diinginkan dengan pusat (Kementerian Perdagangan)

- Dalam upaya membantu dan mengembangkan UMKM (PKL) agar tertata rapi maka diharapkan partisipasi dari Kementerian Perdagangan RI untuk membantu para PKL dalam memberi bantuan fasilitas, seperti gerobak, tenda, dan cool box.
- Dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok dan penting serta untuk meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten/Kota diharapkan adanya pembangunan/revitalisasi pasar, dan pembangunan sarana dan prasarana Kemetrolagian melalui DAK atau TP secara berkelanjutan.
- Dalam upaya untuk memingkatkan kelancaran dan ketersediaan distribusi arus barang kebutuhan pokok dan barang penting khususnya di daerah perbatasan diharapkan adanya pembangunan pasar dan gudang logistik serta subsidi ongkos angkut.

c. Isu dan Masalah mendesak beserta Solusi dan Harapan Perdagangan Luar Negeri

i) Isu dan masalah mendesak.

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekspor non migas Kalimantan Timur, ditemui berbagai permasalahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah :

- Belum maksimalnya networking pasar luar negeri.

- Masih rendahnya pemanfaatan informasi /akses pasar luar negeri.
- Terbatasnya kemampuan SDM UKM ekspor.
- Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui.
- Rendahnya daya saing pelaku usaha kaltim dengan daerah lain baik dari aspek kualitas komoditi maupun kuantitas.
- Tidak stabilnya permintaan negara tujuan ekspor.
- Tidak stabilnya harga pasar internasional.

ii) Upaya yang dilakukan (Solusi)

- Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
- Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
- Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
- Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
- Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
- Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.

- Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

iii) Harapan yang diinginkan dengan pusat (Kementerian Perdagangan)

- Memperbaiki formulasi dan koordinasi kebijakan perdagangan.
- Menghilangkan kendala (bottle neck) infrastruktur dan hambatan internal lainnya, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.
- Kebijakan Memberi peluang untuk pengembangan nilai tambah komoditi.
- Pengembangan fasilitas ekspor impor online melalui inatrade.
- Meningkatkan koordinasi kebijakan perdagangan, industri, pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan agar percepatan industri-industri berdaya saing segera terwujud.
- Mendorong pemanfaatan pelabuhan internasional Kariangau sebagai pelabuhan ekspor impor.

d. Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di UPTD BPSMB

i) Isu dan masalah mendasak.

- Laboratorium Pengujian Belum Maksimal dalam Memberikan Pelayanan Pengujian terhadap Komoditi/Produk yang dihasilkan di Provinsi Kalimantan Timur.

Contoh antara lain:

- Pengujian Karet
- Pengujian Makanan dan Minuman
- Peluang Retribusi Daerah dari Pelayanan Pengujian Komoditi CPO bila para pelaku usaha memanfaatkan kemampuan Laboratorium yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- Peningkatan Penerapan Standar pada UKM Produk Makanan (Amplang) di Kab/Kota.

ii) Upaya yang dilakukan (Solusi)

- Diadakannya penerimaan tenaga non PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan (SMK Analis, SMA IPA, D3 Kimia, S1 Kimia/ Biologi/ Fisika / Teknik).
- Diadakan pelatihan / diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi personal.
- Diadakan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium pengujian sehingga pelayanan kepadadunia usaha, pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat dapat terpenuhi.
- Diadakannya penerimaan tenaga non PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan yangdibutuhkan (SMK Mesin / Elektronika, D3 Instrumen / Teknik Elektro, S1 Fisika / Teknik Elektro).
- Diadakan pelatihan / diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi personal.
- Diadakan pemenuhan kebutuhan peralatan standar laboratorium kalibrasi sehingga pelayanan kepada dunia usaha, pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat dapat terpenuhi.
- Diadakannya penerimaan tenaga PNS yang bergerak di bidang standardisasi dan akreditasi sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan Sarjana S1.

iii) Harapan yang diinginkan dengan Pusat (Kementrian Perdagangan)

- Pemberian bantuan peralatan laboratorium pengujian dan kalibrasi.
- Pemberian bantuan pelatihan / diklat sistem manajemen lembaga sertifikasi.

e) Isu dan Masalah Mendesak beserta Solusi dan Harapan di Bidang Koperasi dan UKM.

i) Isu dan Masalah Mendesak :

Isu mendasar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pembagian urusan dimana salah satunya pembagian urusan koperasi dan UMKM yang mengatur kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu lainnya seperti aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasaran dan aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM). Permasalahan yang dihadapi di koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- Pembagian kewenangan urusan koperasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasakan membatasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi karena cakupan pembinaan koperasi dan UMKM hanya mencakup koperasi yang anggotanya lintas kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil saja.
- Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan.
- Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM baik dari segi kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.

- Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi mengakibatkan terlambatnya UMKM dalam mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha.
- Pelaksanaan diklat koperasi dan UMKM dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala dalam kegiatan pendampingannya. Hal ini disebabkan lokasi koperasi Peserta diklat terpencar dan terpencil sehingga agak menyulitkan untuk dilakukan pendampingan karena selain jaraknya yang jauh, sarana transportasi dan informasi juga masih sulit.
- Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat salah satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau D3. Sedangkan di Kaltim, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.
- Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : Rehabilitasi, Reorganisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan Online Data System Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
- Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru yang meliputi pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya anggaran dan waktu diklat sehingga

materi yang disampaikan belum dapat dikuasai dan dipraktekkan oleh peserta secara maksimal. Selain itu SDM UMKM yang belum menguasai manajemen usaha dengan baik, menyebabkan usaha tidak dapat berkembang secara optimal. Untuk itu diperlukan juga adanya program pendampingan Wira Usaha Baru (WUB) agar diberikan alokasi anggaran yang mencukupi.

- Terbatasnya kemampuan para pendamping dalam melakukan pendampingan koperasi dan UMKM dalam beberapa aspek terutama dalam aspek teknis sehingga pengembangan usaha UMKM belum berjalan optimal.
- Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UMKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Masih banyak koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal kegiatan usaha koperasi berjalan aktif.

Dengan adanya seksi baru yaitu seksi pengawasan koperasi yang baru terbentuk maka perlu untuk:

1. melakukan sosialisasi atas keberadaan seksi tersebut.
2. masih rendahnya pemahaman aparat yang membidangi pengawasan koperasi, mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 17/Per/M. KUKM/IX/ 2015 tentang Pengawasan Koperasi.
3. Cepatnya perpindahan/mutase aparatur daerah yang menangani koperasi (Satgas Pengawas Koperasi).
4. Rendahnya SDM dan tidak adanya Diklat Pengawas Koperasi bagi aparat.

ii) Upaya Yang Dilakukan (Solusi)

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UMKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UMKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.
- Pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Klinik Bisnis koperasi dan UMKM yang didukung oleh para konsultan/pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusiness yang diikuti oleh para pelaku UMKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
- Memfasilitasi dan mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UMKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa

pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam pendampingan UMKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UMKM, Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain.

iii) Harapan Yang Diinginkan Dengan Pusat

- Optimalisasi dan perluasan program kemitraan dengan lebih banyak pihak dan melibatkan lebih banyak UMKM dan koperasi.
- Program insentif bagi UMKM dalam rangka memperoleh HKI, Halal, SNI dll.
- Adanya aturan yang lebih kuat dan konkrit dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM.
- Adanya peninjauan kembali atau sosialisasi teknis tentang UU Nomor 23 Tahun 2014 mengingat pelaksanaan beberapa program masih menimbulkan kerancuan dalam implementasi di lapangan contohnya pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Provinsi sedangkan lingkup pembinaan provinsi adalah usaha kecil dan sebagian besar sasaran KUR adalah usaha mikro yang merupakan binaan kabupaten/kota, pembinaan wirausaha baru yang merupakan program nasional sedangkan wirausaha baru identik dengan usaha mikro yang merupakan tugas kabupaten/kota untuk pembinaannya, dll.

II.4. Review Terhadap RANKIR RPKD 2021

Sumber Anggaran : APBD

RANCANGAN AKHIR RPKD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
	KODE	NAMA						KODE	NAMA						
1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	16
INDUSTRI								5.600.000.000							
3.07.33	Program peningkatan dan pengembangan industri						5.600.000.000	3.07.33	Program peningkatan dan pengembangan industri					5.600.000.000	
3.07.33.03	-	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri	Kalim	Pelaku Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	2 perusahaan	2.000.000.000	3.07.33.03	- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri	Kalim	Pelaku Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	2 perusahaan	2.000.000.000	
		Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri					385.611.000		Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri					385.611.000	
		Pengembangan Kerjasama Antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar					378.852.000		Pengembangan Kerjasama Antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar					378.852.000	
		Forum percepatan pnumbuan dan pengembangan populasi industri di kawasan industri prioritas					385.537.000		Forum percepatan pnumbuan dan pengembangan populasi industri di kawasan industri prioritas					385.537.000	
3.07.33.04	-	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri	Kalim	Pelaku Industri	jumlah industri yang difasilitasi peneoembanannya	32	3.000.000.000	3.07.33.04	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri	Kalim	Pelaku Industri	jumlah industri yang difasilitasi peneoembanannya	32	3.000.000.000	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi serta Evaluasi Hambatan dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Balikpapan dan Bontang)							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi serta Evaluasi Hambatan dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Balikpapan dan Bontang)						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi se Kalimantan Timur							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi se Kalimantan Timur						
		Pembinaan Sentra Industri Pengolahan Pangan dalam rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri di Samarinda, Kab. Kubar dan Kab. Berau							Pembinaan Sentra Industri Pengolahan Pangan dalam rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri di Samarinda, Kab. Kubar dan Kab. Berau						
		Pembinaan Sentra Industri Kapal dalam rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri Perkapalan di Balikpapan dan Kab. Kutai Kartanegara							Pembinaan Sentra Industri Kapal dalam rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri Perkapalan di Balikpapan dan Kab. Kutai Kartanegara						
		Fasilitasi Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif HUT Dekranasda							Fasilitasi Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif HUT Dekranasda						
		Fasilitasi Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pengurus Dekranasda PProv Kaltim							Fasilitasi Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pengurus Dekranasda PProv Kaltim						
		Fasilitasi Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif pada Gelaran Kaltim Fair di Samarinda							Fasilitasi Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif pada Gelaran Kaltim Fair di Samarinda						
		Fasilitasi Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif pada Gelaran Kaltim Expo di Samarinda							Fasilitasi Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif pada Gelaran Kaltim Expo di Samarinda						
		Rapat Kerja Dekranasda Sei Kaltim							Rapat Kerja Dekranasda Sei Kaltim						
		Penilaian Panil Keberhasilan Pembinaan dan Peneoembanan Industri Kerajinan Kab/Kota Sekalim Pameran Spontanitas Dekranas Kaltim							Penilaian Panil Keberhasilan Pembinaan dan Peneoembanan Industri Kerajinan Kab/Kota Sekalim Pameran Spontanitas Dekranas Kaltim						
		Kunjungan Kerja/Rapat/Koordinasi Dekranasda PProvinsi Kalimantan Timur							Kunjungan Kerja/Rapat/Koordinasi Dekranasda PProvinsi Kalimantan Timur						
		Dekranasda Award Provinsi Kalimantan Timur							Dekranasda Award Provinsi Kalimantan Timur						
		Fasilitasi Pelatihan dan Penguatan Industri Kerajinan Daerah Se Kaltim							Fasilitasi Pelatihan dan Penguatan Industri Kerajinan Daerah Se Kaltim						
		Gebyar Industri Kerajinan Kalimantan Timur Tahun 2021							Gebyar Industri Kerajinan Kalimantan Timur Tahun 2021						
3.07.33.05	-	Kegiatan Pengembangan Informasi Industri	Kalim	Pelaku Industri	jumlah data dan informasi yang tersedia	10500	600.000.000	3.07.33.05	- Kegiatan Pengembangan Informasi Industri	Kalim	Pelaku Industri	jumlah data dan informasi yang tersedia	10500	600.000.000	
		RAKOR PENDATAAN SE - KALTIM							RAKOR PENDATAAN SE - KALTIM						
		FORUM KOORDINASI INDUSTRI BESAR SEDANG							FORUM KOORDINASI INDUSTRI BESAR SEDANG						
		Forum Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi							Forum Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengmpulan,Pengolahan dan Analisis Data SIINAS							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengmpulan,Pengolahan dan Analisis Data SIINAS						
		Pemetaan Sentra - Sentra Industri Kaltim							Pemetaan Sentra - Sentra Industri Kaltim						

NO	PROGRAM / KEGIATANSUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
	KODE	NAMA						KODE	NAMA						
PERDAGANGAN												2.800.000.000			
3.06.34		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan			Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	1.57 milyar	2.800.000.000	3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan			Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	1.57 milyar	2.800.000.000	
3.06.34.01		<i>Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri</i> <i>Sosialisasi dan Pendampingan</i> <i>Benchmark Pengembangan Pusat Distribusi</i> <i>Partisipasi Kegiatan pasar Lelang Perdagangan Dalam Negeri</i> <i>Koordinasi Distribusi , Harga Bapokting</i> <i>Bimtek Petugas Pengelola Sistem Informasi Perdagangan</i> <i>Bimtek Manajemen Pengelolaan Pasar bagi Petugas</i> <i>FGD Pengembangan Distribusi dan Sarana Logistik Bapokting</i> <i>Unit Penegndali Stok dan Harga Bapokting</i> <i>Rakor Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional</i> <i>Operasi Pasar Murah</i>	Kalim	Pelaku Usaha	Rata-rata Rentang Waktu Kecukupan Stok barang penting	5 bulan	1.000.000.000	3.06.34.01	<i>Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri</i> <i>Sosialisasi dan Pendampingan</i> <i>Benchmark Pengembangan Pusat Distribusi</i> <i>Partisipasi Kegiatan pasar Lelang Perdagangan Dalam Negeri</i> <i>Koordinasi Distribusi , Harga Bapokting</i> <i>Bimtek Petugas Pengelola Sistem Informasi Perdagangan</i> <i>Bimtek Manajemen Pengelolaan Pasar bagi Petugas</i> <i>FGD Pengembangan Distribusi dan Sarana Logistik Bapokting</i> <i>Unit Penegndali Stok dan Harga Bapokting</i> <i>Rakor Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional</i> <i>Operasi Pasar Murah</i>	Kalim	Pelaku Usaha	Rata-rata Rentang Waktu Kecukupan Stok barang penting	5 bulan	1.000.000.000	
3.06.34.02		<i>Kegiatan Perdagangan Luar Negeri</i> <i>(Bisnis Matching eksportir)</i> <i>Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Daerah dengan instansi terkait</i> <i>(Bimtek/Pelatihan Terkait Ekspor (Diklat Aparat / Pelaku Usaha dalam rangka Peningkatan Wawasan Perdagangan Luar Negeri</i> <i>Monitoring dan Pelaporan Ekspor/Impor Kab/Kota</i> <i>Ekspor langsung melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan</i> <i>Sosialisasi dan Sinergi Penerbitan Certificat of Origin</i>	Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah Eksportir yang Mendapatkan fasilitasi	60	1.000.000.000	3.06.34.02	<i>Kegiatan Perdagangan Luar Negeri</i> <i>(Bisnis Matching eksportir)</i> <i>Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Daerah dengan instansi terkait</i> <i>(Bimtek/Pelatihan Terkait Ekspor (Diklat Aparat / Pelaku Usaha dalam rangka Peningkatan Wawasan Perdagangan Luar Neeri</i> <i>Monitoring dan Pelaporan Ekspor/Impor Kab/Kota</i> <i>Ekspor langsung melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan</i> <i>Sosialisasi dan Sinergi Penerbitan Certificat of Origin</i>	Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah Eksportir yang Mendapatkan fasilitasi	60	1.000.000.000	
3.06.34.03		<i>Kegiatan Kerjasama Perdagangan</i> <i>Forum Koordinasi Pengembangan Kerjasama Perdagangan antara Kalim dengan Provinsi Lain Pengembangan Desain dan Pemasaran Produk Unggulan Potensial Ekspor Kalim)</i> <i>(Kontak Dagang Pengembangan Pasar Produk Unggulan Kalim</i> <i>Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Kerjasama Perdagangan</i>	Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah UKM yang menjalin perdagangan	10 UKM	800.000.000	3.06.34.03	<i>Kegiatan Kerjasama Perdagangan</i> <i>Forum Koordinasi Pengembangan Pengembangan Desain dan Pemasaran Produk Unggulan Potensial Ekspor Kalim)</i> <i>(Kontak Dagang Pengembangan Pasar Produk Unggulan Kalim</i> <i>Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Kerjasama Perdagangan</i>	Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah UKM yang menjalin perdagangan	10 UKM	800.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
	KODE	NAMA						KODE	NAMA						
UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG							4.500.000.000						4.500.000.000		
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang				Presentasi peningkatan kapasitas dan pelayanan labarotorium pengujian dan kalibrasi	10%	1.400.000.000	3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang			Presentasi peningkatan kapasitas dan pelayanan labarotorium pengujian dan kalibrasi	10%	1.400.000.000	
3.06.33.01	Kegiatan Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang		Kaltim	Pelaku Usaha	Peningkatan Kapasitas laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi	20	700.000.000	3.06.33.01	Kegiatan Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	Kaltim	Pelaku Usaha	Peningkatan Kapasitas laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi	20	700.000.000	
3.06.33.02	Kegiatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi		Kaltim	Pelaku Usaha	Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	1968	700.000.000	3.06.33.02	Kegiatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Kaltim	Pelaku Usaha	Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	1968	700.000.000	
2.11.07	Program Administrasi Perkantoran				Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	88%	1.500.000.000	2.11.07	Program Administrasi Perkantoran			Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	88%	1.500.000.000	
2.11.07.01	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Samarinda	Aparat	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.500.000.000	2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda	Aparat	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.500.000.000	
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	3 unit	800.000.000	2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	3 unit	800.000.000	
2.11.08.01	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Samarinda	Aparat	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	39	300.000.000	2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Aparat	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	39	300.000.000	
2.11.08.02	- Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana		Samarinda	Aparat	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	500.000.000	2.11.08.02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	Samarinda	Aparat	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	500.000.000	
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	50%	800.000.000	2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	50%	800.000.000	
2.11.09.01	- Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah		Samarinda	Aparat	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	10 kegiatan	450.000.000	2.11.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Samarinda	Aparat	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	10 kegiatan	450.000.000	
2.11.09.02	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Aparat	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 PNS	350.000.000	2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Aparat	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 PNS	350.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
	KODE	NAMA						KODE	NAMA						
PERLINDUNGAN KONSUMEN & PENGAWASAN BARANG BEREDAR							2.750.000.000						2.750.000.000		
3.06.15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			Meningkat perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	80%	2.750.000.000	3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			Meningkat perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	80%	2.750.000.000	
3.06.15.01		Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	samarinda dan berau	Pelaku Usaha	Jumlah Konsumen yang tereduksi	1000 Konsumen	1.000.000.000	3.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	samarinda dan berau	Pelaku Usaha	Jumlah Konsumen yang tereduksi	1000 Konsumen	1.000.000.000	
		EdukasiKonsumen Cerdas Bagi Mahasiwa dan ASN Se Kaltim							EdukasiKonsumen Cerdas Bagi Mahasiwa dan ASN Se Kaltim						
		Edukasi Langsung Koncer SLTA							Edukasi Langsung Koncer SLTA						
		Cetak Leafate edukasi Konsumen Cerdas Untuk Komunitas							Cetak Leafate edukasi Konsumen Cerdas Untuk Komunitas						
		Rapat Kerja/ Koordinasi/ Konsultasi Teknis Kegiatan PKTN							Rapat Kerja/ Koordinasi/ Konsultasi Teknis Kegiatan PKTN						
		Hari Konsumen Nasional (HARKONAS)							Hari Konsumen Nasional (HARKONAS)						
		Roll Up Banner							Roll Up Banner						
		Administrasi (ATK, Fotocopy)							Administrasi (ATK, Fotocopy)						
		Forum/Singkronisasi/Koordinasi/Monev							Forum/Singkronisasi/Koordinasi/Monev						
3.06.15.03		Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Kaltim	Pelaku Usaha	jumlah pelaku usaha yang diawasi	150 Pelaku Usaha	865.000.000	3.06.15.03	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Kaltim	Pelaku Usaha	jumlah pelaku usaha yang diawasi	150 Pelaku Usaha	865.000.000	
		Pengawasan Barang Beredar dan Jasa / Pengawasan Perdagangan Obat dan Makanan							Pengawasan Barang Beredar dan Jasa / Pengawasan Perdagangan Obat dan Makanan						
		Uji Sampel							Uji Sampel						
		Pembelian Sampel							Pembelian Sampel						
		Biaya Pengiriman Sampel							Biaya Pengiriman Sampel						
		Transport Lokal Pendamping							Transport Lokal Pendamping						
		ATK							ATK						
		Foto Copy							Foto Copy						
		Makan Minum Rapat							Makan Minum Rapat						
		Bimtek Dasar Pendamping Petugas Pengawas Barang dan Jasa							Bimtek Dasar Pendamping Petugas Pengawas Barang dan Jasa						
		Pengadaan Baju Rompi Pengawasan							Pengadaan Baju Rompi Pengawasan						
		Perdin Luar Daerah Koordinasi Hasil Pengawasan							Perdin Luar Daerah Koordinasi Hasil Pengawasan						
		Peningkatan Perlindungan Konsumen Jasa Perparkiran							Peningkatan Perlindungan Konsumen Jasa Perparkiran						
3.06.15.08		Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	Kaltim	Pelaku Usaha	Jumlah Pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan	25 Pengaduan	885.000.000	3.06.15.08	Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	Kaltim	Pelaku Usaha	Jumlah Pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan	25 Pengaduan	885.000.000	
					Jumlah Pengiriman data SISWAS -PK (Sistem Pengawasan perlindungan konsumen)	175 Data						Jumlah Pengiriman data SISWAS -PK (Sistem Pengawasan perlindungan konsumen)	175 Data		
		ForumKomunikasi BPSK Se Kalimantan Timur di Balikpapan							ForumKomunikasi BPSK Se Kalimantan Timur di Balikpapan						
		Honorarium BPSK							Honorarium BPSK						
		ATK BPSK/ Suplies Komputer							ATK BPSK/ Suplies Komputer						
		Belanja Pengandaan/ Fotocopy/ Penjildan							Belanja Pengandaan/ Fotocopy/ Penjildan						
		Makan Minum							Makan Minum						
		Baju BPSK							Baju BPSK						
		Perdinas Dalam Daerah/ Saksi Ahli Pengaduan							Perdinas Dalam Daerah/ Saksi Ahli Pengaduan						
		Peningkata Kompetensi Luar Daerah Jawa Tengah dan Sulawesi							Peningkata Kompetensi Luar Daerah Jawa Tengah dan Sulawesi						
		Aplikasi BPSK							Aplikasi BPSK						
		Dialog Interaktif							Dialog Interaktif						
		Honor Pelantikan BPSK							Honor Pelantikan BPSK						
		- Honor Pengambilan Sumpah							- Honor Pengambilan Sumpah						
		- Makan Minum Pelantikan							- Makan Minum Pelantikan						

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
	KODE	NAMA						KODE	NAMA						
KOPERASI & UKM												4.800.000.000			
2.11.20		Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM			Jumlah Koperasi yang berkualitas Jumlah UKM naik Kelas Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan	100 200 300	4.800.000.000	2.11.20	Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM			Jumlah Koperasi yang berkualitas Jumlah UKM naik Kelas Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan	100 200 300	4.800.000.000	
2.11.20.01		Kegiatan Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM Penguatan Kelembagaan Koperasi Sektor Riil Bimtek Upgrading Tenaga Pendamping Sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM Pendataan Koperasi dan UKM Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Koperasi dan UKM Dukungan Operasional PPKL Pemeringkatan Koperasi	Kaltim	Koperasi & UKM			1.000.000.000	2.11.20.01	Kegiatan Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM Penguatan Kelembagaan Koperasi Sektor Riil Bimtek Upgrading Tenaga Pendamping Sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM Pendataan Koperasi dan UKM Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Koperasi dan UKM Dukungan Operasional PPKL Pemeringkatan Koperasi	Kaltim	Koperasi & UKM			1.000.000.000	
2.11.20.02		Kegiatan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran Pendampingan Pengembangan UKM Temu Mitra Usaha (kegiatan 1 hari) Bimtek Manajemen Usaha (Permodalan, Manajemen Keuangan, Kemasan , Pengembangan Usaha) -- 1 Kajian Kontribusi Sektor Koperasi dan UKM Thd PDRB HARKOPNAS EXPO Luar Daerah Gebyar Wirausaha Tahun 2021 Diklat Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sertifikasi Halal Kontak Bisnis Panji Keberhasilan Monitoring Program Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM	Kaltim	Koperasi & UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang difasilitasi pembiayaan dan Pemasaran	500	1.000.000.000	2.11.20.02	Kegiatan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran Pendampingan Pengembangan UKM Temu Mitra Usaha (kegiatan 1 hari) Bimtek Manajemen Usaha (Kajian Kontribusi Sektor Koperasi dan UKM Thd PDRB HARKOPNAS EXPO Luar Daerah Gebyar Wirausaha Tahun 2021 Diklat Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sertifikasi Halal Kontak Bisnis Panji Keberhasilan Monitoring Program Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM	Kaltim	Koperasi & UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang difasilitasi pembiayaan dan Pemasaran	500	1.000.000.000	
2.11.20.03		Kegiatan Pengawasan Koperasi Rapat Kerja Pengawasan Se Kalimantan Timur Bimtek Pengawasan Bagi Aparat Koperasi Se Kalimantan Timur Pengawasan Koperasi Se Kalimantan Timur	Kaltim	Koperasi & UKM	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100	500.000.000	2.11.20.03	Kegiatan Pengawasan Koperasi Rapat Kerja Pengawasan Se Kalimantan Timur Bimtek Pengawasan Bagi Aparat Koperasi Se Kalimantan Timur Pengawasan Koperasi Se Kalimantan Timur	Kaltim	Koperasi & UKM	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100	500.000.000	
2.11.20.04		Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Kaltim	Koperasi & UKM	Jumlah KUKM yang mendapatkan pelatihan	900	2.300.000.000	2.11.20.04	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Kaltim	Koperasi & UKM	Jumlah KUKM yang mendapatkan pelatihan	900	2.300.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
	KODE	NAMA						KODE	NAMA						
UPTD Pusat Pelatihan Koperasi dan UMKM												4.500.000.000			
2.11.15.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah				Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih	300 org	1.000.000.000	2.11.15.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah			Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih	300 org	1.000.000.000	
	- Penilaian Penumbuhan Pelatihan Koperasi & UMKM		0 kab/kota	Koperasi dan UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	10 Dokumen	500.000.000		- Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	10 kab/kota	Koperasi dan UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	10 Dokumen	500.000.000	
	- Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM		0 kab/kota	Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	15 pelatihan	500.000.000		- Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	10 kab/kota	Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	15 pelatihan	500.000.000	
	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi								Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi						
	Pelatihan Penguatan Kapasitas Anggota Koperasi								Pelatihan Penguatan Kapasitas Anggota Koperasi						
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi								Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi						
	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi								Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi						
	Pelatihan Legal Standing Koperasi								Pelatihan Legal Standing Koperasi						
	Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) Bagi UKM								Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) Bagi UKM						
	Pelatihan Pemasaran Online Bagi UKM								Pelatihan Pemasaran Online Bagi UKM						
	Pelatihan Pembuatan Proposal Dana Hibah WP 2020								Pelatihan Pembuatan Proposal Dana Hibah WP 2020						
	Pelatihan Perluasan Akses Pasar Bagi UKM								Pelatihan Perluasan Akses Pasar Bagi UKM						
	Pelatihan Desain Kemasan Produk Bagi UKM								Pelatihan Desain Kemasan Produk Bagi UKM						
	Pelatihan Pembuatan Keramik Bagi UKM dan WUB								Pelatihan Pembuatan Keramik Bagi UKM dan WUB						
	Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan Bagi UKM dan WUB								Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan Bagi UKM dan WUB						
	Pelatihan Mebel Kayu dan Rotan Bagi UKM dan WUB								Pelatihan Mebel Kayu dan Rotan Bagi UKM dan WUB						
	Pelatihan Pengolahan Produk Makanan Bagi UKM								Pelatihan Pengolahan Produk Makanan Bagi UKM						
2.11.07	Program Administrasi Perkantoran				Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	88%	1.500.000.000	2.11.07	Program Administrasi Perkantoran			Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	88%	1.500.000.000	
2.11.07.01	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Samarinda	Aparat	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.500.000.000	2.11.07.01	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda	Aparat	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.500.000.000	
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	3unit	1.300.000.000	2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	3unit	1.300.000.000	
2.11.08.01	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Samarinda	Aparat	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	8 unit	500.000.000	2.11.08.01	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Aparat	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	8 unit	500.000.000	
2.11.08.02	- Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana		Samarinda	Aparat	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	800.000.000	2.11.08.02	- Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	Samarinda	Aparat	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	800.000.000	
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%) jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah dan luar daerah	50%	700.000.000	2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%) jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah dan luar daerah	50%	700.000.000	
2.11.09.01	- Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah		Samarinda	Aparat	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah dan luar daerah	20	500.000.000	2.11.09.01	- Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Samarinda	Aparat	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah dan luar daerah	20	500.000.000	
2.11.09.02	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	7	200.000.000	2.11.09.02	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	7	200.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING		
	KODE	NAMA						KODE	NAMA								
SEKRETARIAT															24.050.000.000	13.093.696.736	
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah				Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)	76	1.400.000.000	2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan			Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (Nilai AKIP)	76	1.400.000.000			
2.11.10.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kegiatan Forum Peringkat Daerah Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Se Kaltim		Samarinda	Aparat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	800.000.000	2.11.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kegiatan Forum Peringkat Daerah Perjalanan dalam rangka penyusunan perencanaan tingkat nasional TIM Review Renstra 2019-2023	Samarinda	Aparat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	800.000.000			
	Perjalanan dalam rangka penyusunan perencanaan tingkat nasional TIM Review Renstra 2019-2023																
2.11.10.01	- Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TIM PUG		Samarinda	Aparat	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	600.000.000	2.11.10.01	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TIM PUG	Samarinda	Aparat	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	600.000.000			
	TIM PUG DAN PENGEMBANGAN WEBSITE TIM REFORMASI BIROKRASI TIM ISO 9001:2015 TIM penilaian Resiko																
2.11.07	Program Administrasi Perkantoran				Tingkat kepuasan pemangku kepentingan	88%	3.950.000.000	2.11.07	Program Administrasi Perkantoran			Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap	88%	3.950.000.000			
2.11.07.01	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Samarinda	Aparat	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 Bulan	3.950.000.000	2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda	Aparat	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 Bulan	3.950.000.000			
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	5 unit	17.000.000.000	2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit)	5 unit	5.850.000.000			
2.11.08.01	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Samarinda	Aparat	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	30 unit	15.000.000.000	2.11.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Aparat	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	30 unit	3.850.000.000	Pembangunan Gedung Disperindagkop Tahap II		
2.11.08.02	- Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana		Samarinda	Aparat	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	2.000.000.000	2.11.08.02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	Samarinda	Aparat	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	2.000.000.000			
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	60%	1.700.000.000	2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	60%	1.893.696.736			
2.11.09.01	- Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah		Samarinda	Aparat	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	78 kegiatan	1.500.000.000	2.11.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Samarinda	Aparat	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	78 kegiatan	1.693.696.736			
2.11.09.02	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Aparat	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 PNS	200.000.000	2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Aparat	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20 PNS	200.000.000			
	Non Proram Non Kegiatan Belanja Gaji PNS		Samarinda	Aparat	Jumlah Dokumen Gaji PNS	200	-		Non Proram Non Kegiatan Belanja Gaji PNS	Samarinda	Aparat	Jumlah Dokumen Gaji PNS	200	17.755.879.000			
TOTAL							49.000.000.000			TOTAL		55.799.575.736					

II.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Sumber Anggaran : APBD

RANCANGAN AKHIR RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
	KODE	NAMA						KODE	NAMA				
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
INDUSTRI							INDUSTRI						
3.07.33	Program peningkatan dan pengembangan industri		Kalim	Pelaku Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	2 perusahaan	3.07.33	Program peningkatan dan pengembangan industri		Kalim	Pelaku Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	2 perusahaan
3.07.33.03	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri Pengembangan Kerjasama Antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar Forum percepatan pertumbuhan dan pengembangan populasi industri di kawasan industri prioritas						3.07.33.03	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri Pengembangan Kerjasama Antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar Forum percepatan pertumbuhan dan pengembangan populasi industri di kawasan industri prioritas					
3.07.33.04	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi serta Evaluasi Hambatan dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Balikpapan dan Bontang) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi se Kalimantan Timur Pembinaan Sentra Industri Pengolahan Pangan dalam rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri di Samarinda, Kab. Kubar dan Kab. Berau Pembinaan Sentra Industri Kapal dalam rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri Perkapalan di Balikpapan dan Kab. Kutai Kartanegara Fasilitas Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif HUT Dekranasda Fasilitas Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pengurus Dekranasda PProv Kaltim Fasilitas Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif pada Gelaran Kaltim Fair di Samarinda Fasilitas Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif pada Rapat Kerja Dekranasda Sei Kaltim Penilaian Panji Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kerajinan Kab/Kota Sekalim Pameran Sportanitas Dekranas Kaltim Kunjungan Kerja/Rapat/Koordinasi Dekranasda PProvinsi Kalimantan Timur Dekranasda Award Provinsi Kalimantan Timur		Kalim	Pelaku Industri	jumlah industri yang difasilitasi pengembangannya	32	3.07.33.04	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi serta Evaluasi Hambatan dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Balikpapan dan Bontang) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi se Kalimantan Timur Pembinaan Sentra Industri Pengolahan Pangan dalam rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri di Samarinda, Kab. Kubar dan Kab. Berau Pembinaan Sentra Industri Kapal dalam rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri Perkapalan di Balikpapan dan Kab. Kutai Kartanegara Fasilitas Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif HUT Dekranasda Fasilitas Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pengurus Dekranasda PProv Kaltim Fasilitas Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif pada Gelaran Kaltim Fair di Samarinda Fasilitas Gelar Produk Kerajinan dan industri Kreatif pada Rapat Kerja Dekranasda Sei Kaltim Penilaian Panji Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kerajinan Kab/Kota Sekalim Pameran Sportanitas Dekranas Kaltim Kunjungan Kerja/Rapat/Koordinasi Dekranasda PProvinsi Kalimantan Timur Dekranasda Award Provinsi Kalimantan Timur		Kalim	Pelaku Industri	jumlah industri yang difasilitasi pengembangannya	32
3.06.34.01	Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri Sosialisasi dan Pendampingan Benchmark Pengembangan Pusat Distribusi Partisipasi Kegiatan pasar Lelang Perdaan Dalam Negeri Koordinasi Distribusi, Harga Bapokting Bimtek Petugas Pengelola Sistem Informasi Perdagangan Bimtek Manajemen Pengelolaan Pasar bagi Petugas FGD Pengembangan Distribusi dan Sarana Unit Penengdali Stok dan Harga Bapokting Rakor Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Operasi Pasar Murah						Kalim	Pelaku Usaha	Rata-rata Rentang Waktu Kecukupan Stok barang penting				

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
	KODE	NAMA						KODE	NAMA				
	3.06.34.02	<p><i>Kegiatan Perdagangan Luar Negeri (Bisnis Matching eksportir)</i></p> <p><i>Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Daerah dengan Instansi terkait (Bimtek/Pelatihan Terkait Ekspor</i></p> <p><i>(Diklat Aparat / Pelaku Usaha dalam rangka Peningkatan Wawasan Perdagangan Luar Negeri</i></p> <p><i>Monitoring dan Pelaporan Ekspor/Impor Kab/Kota</i></p> <p><i>Ekspor langsung melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan</i></p> <p><i>Sosialisasi dan Sinergi Penerbitan Certificat of Origin</i></p>	Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah Eksportir yang Mendapatkan fasilitasi	60		3.06.34.02	<p><i>Kegiatan Perdagangan Luar Negeri (Bisnis Matching eksportir)</i></p> <p><i>Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Daerah dengan Instansi terkait (Bimtek/Pelatihan Terkait Ekspor</i></p> <p><i>(Diklat Aparat / Pelaku Usaha dalam rangka Peningkatan Wawasan Perdagangan Luar Negeri</i></p> <p><i>Monitoring dan Pelaporan Ekspor/Impor Kab/Kota</i></p> <p><i>Ekspor langsung melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan</i></p> <p><i>Sosialisasi dan Sinergi Penerbitan Certificat of Origin</i></p>	Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah Eksportir yang Mendapatkan fasilitasi	60
	3.06.34.03	<p><i>Kegiatan Kerjasama Perdagangan</i></p> <p><i>Forum Koordinasi Pengembangan Kerjasama Perdagangan antara Kalim dengan Provinsi Lain</i></p> <p><i>Pengembangan Desain dan Pemasaran Produk Unggulan Potensial Ekspor Kalim)</i></p> <p><i>(Kontak Dagang Pengembangan Pasar Produk Unggulan Kalim</i></p> <p><i>Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Kerjasama Perdagangan</i></p>	Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah UKM yang menjalin perdagangan	10 UKM		3.06.34.03	<p><i>Kegiatan Kerjasama Perdagangan</i></p> <p><i>Forum Koordinasi Pengembangan Kerjasama Perdagangan antara Kalim dengan Provinsi Lain</i></p> <p><i>Pengembangan Desain dan Pemasaran Produk Unggulan Potensial Ekspor Kalim)</i></p> <p><i>(Kontak Dagang Pengembangan Pasar Produk Unggulan Kalim</i></p> <p><i>Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Kerjasama Perdagangan</i></p>	Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah UKM yang menjalin perdagangan	10 UKM

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
	KODE	NAMA						KODE	NAMA				
UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG													
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang				Presentasi peningkatan kapasitas dan pelayanan laboratorium pengujian dan kalibrasi	10%	3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang				Presentasi peningkatan kapasitas dan pelayanan laboratorium pengujian dan kalibrasi	10%
3.06.33.01	Kegiatan Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang		Kalim	Pelaku Usaha	Peningkatan Kapasitas laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi	20	3.06.33.01	Kegiatan Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang		Kalim	Pelaku Usaha	Peningkatan Kapasitas laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi	20
3.06.33.02	Kegiatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi		Kalim	Pelaku Usaha	Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	1968	3.06.33.02	Kegiatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi		Kalim	Pelaku Usaha	Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	1968
PERLINDUNGAN KONSUMEN & PENGAWASAN BARANG BEREDAR													
3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				Meningkat perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan	80%	3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				Meningkat perlindungan konsumen dan pengaman perdagangan	80%
3.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Edukasi Konsumen Cerdas Bagi Mahasiswa dan ASN Se Kalimantan Edukasi Langsung Koncer SLTA Cetak Leaflete edukasi Konsumen Cerdas Untuk Komunitas Rapat Kerja/ Koordinasi/ Konsultasi Teknis Kegiatan PKTN Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) Roll Up Banner Administrasi (ATK, Fotocopy) Forum/Singkronisasi/Koordinasi/Monev		samarinda dan berau	Pelaku Usaha	Jumlah Konsumen yang teredukasi	1000 Konsumen	3.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Edukasi Konsumen Cerdas Bagi Mahasiswa dan ASN Se Kalimantan Edukasi Langsung Koncer SLTA Cetak Leaflete edukasi Konsumen Cerdas Untuk Komunitas Rapat Kerja/ Koordinasi/ Konsultasi Teknis Kegiatan PKTN Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) Roll Up Banner Administrasi (ATK, Fotocopy) Forum/Singkronisasi/Koordinasi/Monev		samarinda dan berau	Pelaku Usaha	Jumlah Konsumen yang teredukasi	1000 Konsumen
3.06.15.03	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Pengawasan Barang Beredar dan Jasa / Pengawasan Perdagangan Obat dan Makanan Uji Sampel Pembelian Sampel Biaya Pengiriman Sampel Transport Lokal Pendamping ATK Foto Copy Makan Minum Rapat Bimtek Dasar Pendamping Petugas Pengawas Barang dan Jasa Pengadaan Baju Rompi Pengawasan Perdin Luar Daerah Koordinasi Hasil Pengawasan Peningkatan Perlindungan Konsumen Jasa Perparkiran		Kalim	Pelaku Usaha	jumlah pelaku usaha yang diawasi	150 Pelaku Usaha	3.06.15.03	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Pengawasan Barang Beredar dan Jasa / Pengawasan Perdagangan Obat dan Makanan Uji Sampel Pembelian Sampel Biaya Pengiriman Sampel Transport Lokal Pendamping ATK Foto Copy Makan Minum Rapat Bimtek Dasar Pendamping Petugas Pengawas Barang dan Jasa Pengadaan Baju Rompi Pengawasan Perdin Luar Daerah Koordinasi Hasil Pengawasan Peningkatan Perlindungan Konsumen Jasa Perparkiran		Kalim	Pelaku Usaha	jumlah pelaku usaha yang diawasi	150 Pelaku Usaha
3.06.15.08	Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen Forum/Komunikasi BPSK Se Kalimantan Timur di Balikpapan Honorarium BPSK ATK BPSK/ Suplies Komputer Belanja Pengadaan/ Fotocopy/ Penilidan Makanan Minum Baju BPSK Perdinas Dalam Daerah/ Saksi Ahli Pengaduan Peningkata Kompetensi Luar Daerah Jawa Tengah dan Sulawesi Aplikasi BPSK Dialog Interaktif Honor Pelantikan BPSK - Honor Pengambilan Sumpah - Makan Minum Pelantikan		Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah Pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan Jumlah Pengiriman data SISWAS -PK (Sistem Pengawasan perlindungan konsumen)	25 Pengaduan 175 Data	3.06.15.08	Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen Forum/Komunikasi BPSK Se Kalimantan Timur di Balikpapan Honorarium BPSK ATK BPSK/ Suplies Komputer Belanja Pengadaan/ Fotocopy/ Penilidan Makanan Minum Baju BPSK Perdinas Dalam Daerah/ Saksi Ahli Pengaduan Peningkata Kompetensi Luar Daerah Jawa Tengah dan Sulawesi Aplikasi BPSK Dialog Interaktif Honor Pelantikan BPSK - Honor Pengambilan Sumpah - Makan Minum Pelantikan		Kalim	Pelaku Usaha	Jumlah Pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan Jumlah Pengiriman data SISWAS -PK (Sistem Pengawasan perlindungan konsumen)	25 Pengaduan 175 Data

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB		LOKASI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
	KODE	NAMA						KODE	NAMA				
KOPERASI & UKM													
2.11.20		Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM			Jumlah Koperasi yang berkualitas Jumlah UKM naik Kelas	100 200 300	2.11.20		Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi dan UKM			Jumlah Koperasi yang berkualitas Jumlah UKM naik Kelas	100 200 300
2.11.20.01		Kegiatan Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM Penguatan Kelembagaan Koperasi Sektor Riil Bimtek Upgrading Tenaga Pendamping Sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM Pendataan Koperasi dan UKM Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Koperasi dan UKM Dukungan Operasional PPKL Pemerinkatan Koperasi Kegiatan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran	Kalim	Koperasi & UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan		2.11.20.01		Kegiatan Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM Penguatan Kelembagaan Koperasi Sektor Riil Bimtek Upgrading Tenaga Pendamping Sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM Pendataan Koperasi dan UKM Koordinasi dan Konsultasi pengembangan Koperasi dan UKM Dukungan Operasional PPKL Pemerinkatan Koperasi Kegiatan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran	Kalim	Koperasi & UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan	
2.11.20.02		Pendampingan Penquebangan UKM Temu Mitra Usaha (kegiatan 1 hari) Bimtek Manajemen Usaha (Permodalan, Manajemen Keuangan, Kemasn , Penquebangan Usaha) -- 1 hari Kajian Kontribusi Sektor Koperasi dan UKM Thd PDRB HARKOPNAS EXPO Luar Daerah Gebyar Wirausaha Tahun 2021 Diklat Penquebangan Produk Unqulan Daerah Sertifikasi Halal Kontak Bisnis Panli Keberhasilan Monitoring Program Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM	Kalim	Koperasi & UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang difasilitasi pembiayaan dan Pemasaran	500	2.11.20.02		Pendampingan Penquebangan UKM Temu Mitra Usaha (kegiatan 1 hari) Bimtek Manajemen Usaha (Permodalan, Manajemen Keuangan, Kemasn , Penquebangan Usaha) -- 1 hari Kajian Kontribusi Sektor Koperasi dan UKM Thd PDRB HARKOPNAS EXPO Luar Daerah Gebyar Wirausaha Tahun 2021 Diklat Penquebangan Produk Unqulan Daerah Sertifikasi Halal Kontak Bisnis Panli Keberhasilan Monitoring Program Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM	Kalim	Koperasi & UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang difasilitasi pembiayaan dan Pemasaran	500
2.11.20.03		Kegiatan Pengawasan Koperasi Rapat Kerja Pengawasan Se Kalimantan Timur Bimtek Pengawasan Bagi Aparat Koperasi Se Kalimantan Timur Pengawasan Koperasi Se Kalimantan Timur	Kalim	Koperasi & UKM	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100	2.11.20.03		Kegiatan Pengawasan Koperasi Rapat Kerja Pengawasan Se Kalimantan Timur Bimtek Pengawasan Bagi Aparat Koperasi Se Kalimantan Timur Pengawasan Koperasi Se Kalimantan Timur	Kalim	Koperasi & UKM	jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	100
2.11.20.04		Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Kalim	Koperasi & UKM	Jumlah KUKM yang mendapatkan pelatihan	900	2.11.20.04		Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Kalim	Koperasi & UKM	Jumlah KUKM yang mendapatkan pelatihan	900
UPTD Pusat Pelatihan Koperasi dan UMKM													
2.11.15.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Pelatihan Penguatan Kapasitas Anggota Koperasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Pelatihan Legal Standing Koperasi Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) Bagi UKM Pelatihan Pemasaran Online Bagi UKM	10 kab/kota 10 kab/kota	Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	300 org 10 Dokumen 15 pelatihan	2.11.15.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Pelatihan Penguatan Kapasitas Anggota Koperasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Pelatihan Legal Standing Koperasi Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) Bagi UKM Pelatihan Pemasaran Online Bagi UKM	10 kab/kota 10 kab/kota	Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	300 org 10 Dokumen 15 pelatihan
		Pelatihan Pembuatan Proposal Dana Hibah WP 2020							Pelatihan Pembuatan Proposal Dana Hibah WP 2020				
		Pelatihan Perluasan Akses Pasar Bagi UKM							Pelatihan Perluasan Akses Pasar Bagi UKM				
		Pelatihan Desain Kemasan Produk Bagi UKM							Pelatihan Desain Kemasan Produk Bagi UKM				
		Pelatihan Pembuatan Keramik Bagi UKM dan WUB							Pelatihan Pembuatan Keramik Bagi UKM dan WUB				
		Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan Bagi UKM dan WUB							Pelatihan Kerajinan Anyaman Rotan Bagi UKM dan WUB				
		Pelatihan Mebel Kayu dan Rotan Bagi UKM dan WUB							Pelatihan Mebel Kayu dan Rotan Bagi UKM dan WUB				
		Pelatihan Pengolahan Produk Makanan Bagi UKM							Pelatihan Pengolahan Produk Makanan Bagi UKM				

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Tema RKP tahun 2021 Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan fokus: Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional kebijakan nasional sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Sektor Perindustrian

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Industri ,sebagai berikut :

- Kebijakan pengembangan sumber daya industri
- Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
- Kebijakan pemberdayaan industri
- Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
- Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal
- Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Perindustrian pada program peningkatan daya saing dan nilai tambah industri, terutama dalam rangka pemulihan kondisi industri akibat pandemi Covid-19. Dengan arah kebijakan :

program yang terintegrasi yang mengarah pada peningkatan daya saing sektor industri. Langkah strategis yang perlu ditempuh, antara lain komersialisasi teknologi, penyiapan sumber daya manusia (SDM)

industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan penyiapan infrastruktur digital.

3.1.2 Sektor Perdagangan

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor.
- Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
- Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
- Peningkatan pemberdayaan konsumen Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perlindungan konsumen,
- Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
- Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam
- Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
- Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
- Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian.

3.1.3. Sektor Koperasi dan UKM

Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

- Prioritas pemberdayaan Koperasi & UMKM pada sektor ril (produksi) yang berorientasi substitusi ekspor dan impor
- Pengembangan Koperasi & UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi komoditas dan wilayah.
- Pemberdayaan dilakukan secara lintas sektoral, dan melibatkan pihak ketiga sebagai off taker atau sebagai avalis.
- Pemberdayaan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM.
- Modernisasi dan inovasi teknologi

Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemulihan Ekonomi dampak Dari Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- Reformasi Total Koperasi
- Penurunan Suku Bunga KUR
- Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Koperasi
- Meningkatnya Daya Saing UMKM melalui Kewirausahaan
- Kontribusi Koperasi terhadap PDB Nasional

Program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2021 diatas secara umum telah bersinergi atau sejalan dengan program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Kerja (Renja) 2021 melalui kegiatan yang didanai oleh APBD dan didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat (APBN).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan dan Sasaran

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim dalam menetapkan rencana strategik selama 5 (lima) tahun berdasarkan RPJMD Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM**
- 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah**

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur . Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

2. Pengembangan Hilirisasi Komoditi Kayu, Karet dan Kelapa Sawit.

Hingga saat ini kondisi perekonomian Kalimantan Timur masih bertumpu pada sektor migas dan batubara, namun seiring dengan semakin berkurangnya potensi kedua produk tersebut hanya untuk beberapa tahun kedepan maka pemerintah harus berupaya untuk mencari produk alternatif sebagai pengganti. Sektor industri non migas secara nasional terus meningkat dan sejak tahun 1990 telah menjadi sektor paling dominan menggantikan sektor pertanian namun sektor ini masih terpusat di pulau Jawa dan mulai berangsur-angsur mulai memasuki pulau Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.

Sektor Pertambangan, Penggalian dan sektor Industri Pengolahan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur. Nilai tambah sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding sektor lainnya. Kondisi ini ditopang oleh perkembangan pada subsektor Industri Gas Alam Cair (LNG) dari sisi harga. Sehingga meskipun terjadi penurunan tingkat produksi, tapi karena adanya peningkatan harga yang cukup signifikan, maka terjadi kenaikan nilai tambah yang cukup besar.

Disamping itu juga tengah dikembangkan produk CPO, dimana Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Orientasi pasar industri CPO sebagian besar untuk ekspor namun bahan baku industri ini 100% diperoleh dari dalam negeri.

3. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas

Sektor perdagangan dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang merupakan salah satu pilar strategis bagi kesinambungan kinerja ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien dilakukan dengan menyederhanakan sistem perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih diutamakan. Khususnya perdagangan Kalimantan Timur dimana kebutuhan dasar ekonomi masyarakat lebih banyak didatangkan dari luar provinsi dan konektivitas antar wilayah dalam provinsi juga masih menjadi kendala.

4. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.

Masalah Utama Konsumen saat ini adalah tngkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Rendahnya kesadaran konsumen tentang haknya berpotensi mengurangi kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Konsumen semakin perlu diberdayakan untuk membuat keputusan yang optimal, memahami prefensinya masing - masing dan pilihan - pilihan yang tersedia, mengetahui hak - haknya, mengerti kapan haknya di langgar serta mengajukan komplain dan meminta ganti rugi apabila diperlukan.

Keberdayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 cara yaitu perlindungan konsumen dan pendidikan konsumen.

Menurut undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu pendidikan konsumen segala upaya yang bertujuan membekali konsumen dengan informasi dan keterampilan untuk membekali tantang di pasar serta meningkatkan niatnya dengan pemasar, sehingga dapat meningkatnya kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif, maka pemerintah perlu menumbuhkan keberdayaan konsumen. Indikator yang menggambarkan terwujudnya kondisi keberdayaan konsumen (IKK).

Indeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajibannya konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk membentuk kebijakan perlindungan konsumen 5 (lima) Tahun kedepan (2019 - 2023) guna meningkatkan keberdayaan konsumen melalui berbagai upaya edukasi kepada konsumen sebagai langkah preventif terhadap exses negatif

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2021	
1	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerahMeningkatkan ekonomi kerakyatan	1	1. Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	kontribusi sektor industri pengelolaan terhadap PDRB	20%
		2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	15.9 Milyar Dollar
				Disparitas harga antar wilayah	20%
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (%)	36 %		
2	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Jumlah koperasi unggulan	10 Koperasi
				UKM Unggulan	35 UKM

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumens kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang di koordinasikan Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM) , barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa sumber daya untuk menghasilkan keluar atau output dalam bentuk barang atau jasa.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2021 dan
Perkiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM									
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan		1%	5,600,000,000				5,395,810,000
	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	Kaltim	2 Perusahaan	2,000,000,000			2 Perusahaan	1,322,500,000
	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan industri	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan (unit)	Kaltim	32 unit	3,000,000,000			32unit	3,345,930,000
	Kegiatan Pengembangan Informasi Industri	jumlah data dan informasi yang tersedia	kaltim	10500 Data	600,000,000			10500 data	727,380,000
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara		1.57 Milyar Dollar	2,800,000,000				3,688,776,000
3.06.34.01	- Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri	Rata- rata Rentang Waktu Kecukupan Stok barang penting	10 kab/kota	5 bulan	1,000,000,000			4 bulan	1,035,420,000
3.06.34.02	- Kegiatan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksportir yang Mendapatkan fasilitasi		70 Eksportir	1,000,000,000			80 Eksportir	1,086,076,000
3.06.34.03	- Kegiatan Kerjasama Perdagangan	Jumlah UKM yang menjalin perdagangan		12 UKM	800,000,000			12 UKM	1,567,280,000

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	- Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). - % Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.		85%	2,750,000,000			90%	4,318,000,000
3.06.15.03	- Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Konsumen yang telah diberikan edukasi	10 Kab/Kota	1000 Konsumen	1,000,000,000			1000 Konsumen	1,096,000,000
	- Pengawasan Barang Beredar dan /Jasa	Jumlah Barang dan jasa yang sesuai ketentuan	10 kab/kota	22	865,000,000			32	1,639,000,000
	- Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah Pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan		30 Pengaduan	885,000,000			40 Pengaduan	1,583,000,000
2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas		100 Koperasi	4,800,000,000			100 Koperasi	5,833,608,000
		Jumlah UKM naik Kelas		200 UKM				200 UKM	
2.11.20.01	- Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan	Kaltim	300 unit	1,000,000,000			300 unit	849,610,000
2.11.20.02	- Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran	Jumlah Koperasi dan UKM yang difasilitasi	Kaltim	525 KUKM	1,000,000,000			525 KUKM	2,173,130,000

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		<i>pembiayaan dan Pemasaran</i>							
2.11.20.03	<i>Pengawasan Koperasi</i>	<i>jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan</i>		100 Koperasi	500,000,000			100 Koperasi 810,868,000	
2.11.20.04	<i>- Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)</i>	<i>Jumlah KUKM yang mendapatkan pelatihan</i>		1050 Kukm	2,300,000,000				
2.11.07	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		88%	3,950,000,000			88% 1,850,000,000	
2.11.07.01	<i>-Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran</i>	Samarinda	12 bulan	3,950,000,000			12 bulan 1,850,000,000	
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		5 unit	5,850,000,000			5 unit	
2.11.08.01	<i>-Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor</i>	Samarinda		3.850.000.000			1,005,018,000	
2.11.08.02	<i>-Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	Samarinda		2,000,000,000			1,450,000,000	

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi		60%	1,700,000,000			60%	
2.11.09.01	-Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Samarinda	198 keg	1,500,000,000			198 keg	1,850,000,000
2.11.09.02	-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek		20 orang	200,000,000			20 orang	625,000,000
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		76 %	1,400,000,000			77%	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 kab/kota	6 Dok	800,000,000			6 Dok	782,460,000
	- Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	10 kab/kota	4 Dok	600,000,000			4 Dok	645,000,000
UPTD Pelatihan Koperasi dan UKM									
2.11.15.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih			1,000,000,000				
	- Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan	10 kab/kota	10 Dok	500,000,000			10 Dok	723,348,000

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	- Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	<i>Pelatihan Koperasi & UMKM</i> <i>Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan</i>	10 kab/kota	15	500,000,000			18	776,086,000
2.11.07	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		88%	1,500,000,000			89%	
2.11.07.01	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran</i>	Samarinda	12 bulan	1,500,000,000			12 bulan	1,886,767,000
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		3 unit	1,300,000,000			3 unit	
2.11.08.01	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	<i>Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor</i>	Samarinda	8 unit	500,000,000			8 unit	158,449,500.00
2.11.08.02	- Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	<i>Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor</i>	Samarinda	12 bulan	800,000,000			12 bulan	883,983,000.00
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi		50	700,000,000			55	

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.09.01	-Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Samarinda	20	500,000,000			20	557,071,000
2.11.09.02	-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek		7	200,000,000			8	161,795,500
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani		10%	1,400,000,000			10%	
3.06.33.01	- penerapan dan pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	'Peningkatan Kapasitas laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi	Samarinda	20	700,000,000			6 Komoditi dan 16 ruang lingkup dan 1 LS	2,036,060,000
3.06.33.02	- Pelayanan jasa teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Peningkatan 'Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Samarinda	1968 sertifikat	700,000,000			2066 sertifikat	663,060,000
2.11.07	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		88	1,500,000,000			89	1,633,750,000
2.11.07.01	-Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	Samarinda		1,500,000,000				1,633,750,000

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu			800,000,000				
2.11.08.01	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	30 unit	300,000,000			30 unit	300,000,000
2.11.08.02	- Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	12 bulan	5000,000,00			12 bulan	253,560,000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi		50%	8000,000,000			55%	664,220,000
2.11.09.01	- Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Samarinda	10 keg	450,000,000			10 keg	340,060,000
2.11.09.02	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek		20	350,000,000			20	324,160,000
	Non Program Non Kegiatan Belanja tidak Langsung (belanja Gaji PNS)				17,755,879,000				
TOTAL					55.799.575.736				38,141,822,000

BAB 4

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan program Prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

4.1 Program Prioritas

Fokus utama RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yaitu

- a. Peningkatan Ekspor non migas dan batubara yang meliputi Program Prioritas Program Peningkatan dan pengembangan perdagangan dengan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp 1,000,000,000.
- b. Pengembangan Kawasan Industri yang meliputi Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dengan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri sebesar Rp 2,000,000,000

4.2 Program Rutin

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,950,000,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dinas	3,950,000,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB	1,500,000,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPTD Pelatihan Koperasi	1,500,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19,100,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas	17,000,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD BPSMB	800,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Koperasi	1,300,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3,200,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dinas	1,700,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah UPTD BPSMB	800,000,000

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah UPTD Pelatihan Koperasi	700,000,000
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1,400,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	800,000,000
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	600,000,000
Program peningkatan dan pengembangan industri	5,600,000,000
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri	2,000,000,000
Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan industri	3,000,000,000
Kegiatan Pengembangan Informasi Industri	600,000,000
Program Peningkatan dan pengembangan perdagangan	2,800,000,000
Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri	1,000,000,000
Kegiatan Perdagangan Luar Negeri	1,000,000,000
Kegiatan Kerjasama Perdagangan	800,000,000
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	4,800,000,000
Kegiatan Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM	1,000,000,000
Kegiatan Produksi ,pembiayaan dan pemasaran	1,000,000,000
Kegiatan pengawasan koperasi	500,000,000
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	2,300,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2,750,000,000
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	1,000,000,000
Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	865,000,000
Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	885,000,000
Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	2.592.750.000
Kegiatan Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	1.949.875.000
Kegiatan Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	642.875.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.453.553.000
Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Pelatihan KUMKM	703.843.200
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan KUMKM	749.709.800
JUMLAH	49,000,000,000

BAB 5

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim Tahun 2021 ini disusun untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
				Program	Keluaran Sub Kegiatan				
2 17 1 1,07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Perindagkop Jl MT Hariyono	100%	1 paket	14.090.540.145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2 17 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.489.943.560			
2 17 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai setahun	100%	1500 materai	7.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2 17 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa komunikasi yang terbayarkan Jasa Listrik yang terbayarkan Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan	100%	200 Mbps 5600000 Kwh 8809 M3	542.604.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
2 17 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Kebersihan Kantor Luas gedung kantor yang dielihara kebersihannya (m2) Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan (jenis) Penyediaan Jasa Pengiriman surat dan paket Penyediaan Jasa Publikasi setahun	100%	145000 m2 70 jenis 12 unit 51 kali/lembar	939.839.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2 17 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.181.350.000			
2 17 1 1,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan setahun	100%	35 unit	336.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2 17 1 1,09 5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan mebel dalam setahun	100%	30 unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2 17 1 1,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balanza Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat kantor Pemeliharaan Pintu Kantor Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	100%	200 unit 3850 lt 112 unit 76 unit 1000 m2	824.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					500.000.000			
2 17 4 1,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah					500.000.000			
2 17 4 1,01 2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an	Jumlah Koperasi yang diawasi jumlah pengawasan, raker dan satgas jumlah pengukuran penilaian koperasi dan diklat penilaian koperasi	0	100 Koperasi 100 kegiatan 50 kegiatan	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					3.300.000.000			
2 17 6 1,01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					3.300.000.000			
2 17 6 1,01 2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi berkualitas	Jumlah koperasi berkualitas Jumlah Koperasi dan UKM yang terlatih (DAK) Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan Jumlah KUKM yang mendapatkan pelatihan (DAK) Jumlah Peserta Pelatihan (DAK)	0 Koperasi	100 Koperasi 300 orang 150 unit 1050 orang 1050 orang	3.300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (DAK) Non Fisik - PK 21 IKM		
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					500.000.000			
2 17 7 1,01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku					500.000.000			
2 17 7 1,01 1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	Jumlah UKM Naik Kelas Jumlah UKM yang difasilitasi Produksi, pembiayaan dan Pemasaran	0%	200 UKM 150 unit	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					500.000.000			
2 17 8 1,01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					500.000.000			
2 17 8 1,01 1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	jumlah kegiatan strategis sektor koperasi dan ukm	0%	50 kegiatan	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.550.000.000			
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.000.000.000			
3 30 4 1,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi					1.000.000.000			
3 30 4 1,01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase ketersediaan Bapokting; Disparitas harga antar wilayah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan Jumlah Operasi Pasar yang Dilaksanakan Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan harga dan stok rata-rata waktu kecukupan stok barang pokok dan barang Penting	0/0 %/%	5 kegiatan 5 kegiatan 10 pelaku usaha 4 bulan	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.000.000.000			
3 30 5 1,01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah					1.000.000.000			
3 30 5 1,01 5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pendampingan/peleatihan/bimtek Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi daaon Jumlah eksportir baru yang menggunakan SKA (eksportir) Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitas Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0%	4 orang 2 orang 2 orang 250 Eksportir 1,57 milyar US\$ dollar	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					2.750.000.000			
3 30 6 1,01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					2.185.000.000			
3 30 6 1,01 1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dan Sinkronisasi	persentase pelaksanaan penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah Peserta Sosialisasi edukasi Konsumen yang telah diberikan edukasi	0%	100 opd 100 opd	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3 30 6 1,01 3	Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	persentase pelaksanaan penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	jumlah pelaku usaha yang diawasi Jumlah Pengaduan yang diterima	0%	10 pelaku usaha 20 Laporan Pengaduan	1.185.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3 30 6 1,03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					565.000.000			
3 30 6 1,03 1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang	persentase pelaksanaan penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	0%	150 pelaku Usaha 35 Barang/Jasa	565.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					800.000.000			
3 30 7 1,02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi					800.000.000			
3 30 7 1,02 1	Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pengembangan Produk Jumlah UKM yg menjalin kerjasama perdagangan	0 Produk	14 pelaku usaha 12 UKM	800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
				Program	Keluaran Sub Kegiatan						
3 31 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								5.600.000.000		
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								2.000.000.000		
3 31 2 1,01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								2.000.000.000		
3 31 2 1,01 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri Presentase Pertumbuhan Industri Olahan	0 industri	5 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 perusahaan			2.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								3.000.000.000		
3 31 3 1,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan								3.000.000.000		
3 31 3 1,01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata.	Jumlah industri yang dilakukan pengawasan Jumlah industri yg difasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan jumlah industri yg difasilitasi pengembangan Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat jumlah sentra industri yang difasilitasi pengembangannya	0%	10 industri 3 industri 25 unit 5 Dokumen 4 sentra			3.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								600.000.000		
3 31 4 1,01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								600.000.000		
3 31 4 1,01 2	Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia Jumlah Dokumen Data Informasi Industri yang disebarluaskan / dipublikasikan	0 Industri	3 Dokumen 1 Dokumen			600.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
TOTAL									39.400.000.000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021			Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
				Program	Keluaran Sub Kegiatan						
2 17 1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.100.000.000		
2 17 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								3.100.000.000		
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								3.100.000.000		
2 17 1 1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.508.050.000		
2 17 1 1,02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah jumlah tenaga non ASN dan pengamanan aset	100%	10 kegiatan 24 orang			1.508.050.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2 17 1 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								350.000.000		
2 17 1 1,05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	100%	20 orang			350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								442.910.000		
2 17 1 1,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100 unit			14.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	46 unit			300.000.000			
2 17 1 1,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	100%	10 kegiatan			52.000.000			
2 17 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	jumlah barang cetakan dan penggunaan jumlah barang cetakan dan penggunaan	100%	100 dokumen 30000 lembar			76.510.000		PENDAPATAN ASLI	
2 17 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								653.910.000		
2 17 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai dalam setahun Tersedianya jasa pengiriman alat dalam setahun Tersedianya jasa pengiriman dokumen dalam setahun	100%	500 lembar 4 alat 24 dokumen			10.440.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12 bulan			249.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	63 alat 12 bulan			394.470.000		PENDAPATAN ASLI	
2 17 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah								145.130.000		
2 17 1 1,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	100%	1 unit 1 unit			16.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2 17 1 1,09 2	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100%	2 unit 2 unit			54.120.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
2 17 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan genset Jumlah Pemeliharaan Komputer Jumlah Pemeliharaan / Reparasi Alat Laboratorium	100%	1 unit 5 unit 1 alat			48.010.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	12 bulan			26.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
				Program	Keluaran Sub Kegiatan			
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
3 30 6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1.400.000.000
3 30 6 1,02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						1.400.000.000
3 30 6 1,02 1	Verifikasi Mutu Produk	persentase pelaksanaan penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah produk yang diverifikasi Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi (Komoditi dan Ruang lingkup) Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi (Komoditi dan Ruang lingkup) Peningkatan, Pelayanan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (Sertifikat)	0%	2 produk 4 komoditi 13 ruang lingkup 1968 sertifikat	700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3 30 6 1,02 2	Pengembangan Layanan Pengujian	persentase pelaksanaan penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah contoh yang di uji Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi (Komoditi dan Ruang lingkup) Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi (Komoditi dan Ruang lingkup) Peningkatan, Pelayanan jasa teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (Sertifikat)	0%	50 contoh 4 komoditi 13 ruang lingkup 1968 sertifikat	700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						TOTAL	4.500.000.000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.0003 UPTD Pelatihan Koperasi

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
				Program	Keluaran Sub Kegiatan			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2 17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						4.500.000.000
2 17 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3.500.000.000
2 17 1 1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.668.715.000
2 17 1 1,02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	100%	12 Bulan	1.668.715.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000.000
2 17 1 1,05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas	100%	35 Stel	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Pelatihan dan Pendidikan Pegawai	100%	10 OT	140.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						122.785.000
2 17 1 1,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	12 bulan	23.985.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Bahan Logistik Kantor	100%	12 Bulan	57.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Barang Cetak dan Penggandaan	100%	12 Bulan	36.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100%	12 Bulan	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah						500.000.000
2 17 1 1,07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Kendaraan Dinas	100%	12 Bulan	105.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,07 5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Meubeler	100%	12 Bulan	105.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Peralatan dan Mesin	100%	12 Bulan	289.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						201.500.000
2 17 1 1,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedia Jasa Surat Menyurat	100%	12 Bulan	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
				Program	Keluaran Sub Kegiatan			
2 17 1 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12 bulan	198.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					807.000.000		
2 17 1 1 1,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	100%	12 Bulan	27.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	100%	12 Bulan	30.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1 1,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara Peralatan dan Mesin	100%	12 Bulan	152.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1 1,09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara Aset Tetap	100%	12 Bulan	596.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					1.000.000.000		
2 17 5 1,01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.000.000.000		
2 17 5 1,01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah KUKM yang mendapat pelatihan (DAK)	Jumlah Koperasi dan UKM Terlatih	0 KUKM	210 OK	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
TOTAL						4.500.000.000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sub Unit Organisasi :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
				Program	Keluaran Sub Kegiatan			
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.355.879.000		
2 17 1 1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					600.000.000		
2 17 1 1,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	100%	4 Dokumen	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 17 1 1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.755.879.000		
2 17 1 1,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN (Dokumen)	100%	1 Dokumen	17.755.879.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	
TOTAL						18.355.879.000		